

MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Abdul Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone
Abdulaziz18@rocketmail.com

Abstract

Educational institutions are considered as a long term strategic instruments in overcoming the problem of violence and religious radicalism which burst in the post of political reformation. Creating the certainty of education process been positively is equal to ensure the future of the younger generation as the successor to the nation's development. Therefore, educational institutions should be able to create a generation of peace. It is should be a collective duty and obligation to build a breaker movement of radicalism regeneration among young people through education process which is done by strengthening and structuring the understanding of knowledges in various disciplines that studied by pupils and students. So what have to arrange and aligne is not only subjects or study of religion particularly, but all of sources and courses need to be delivered in a humanists and tolerant approach based on strengthening the mental and character nationalism of pupils and students. This paper will attempt to review some aspects that could be adopted by government in order to face the threat of radicalism phenomenon of the youth in educational institutions. Before the main focus, the discussion will be conducted by conceptualization of the problem. This conceptualization begins with an understanding of the concept of religious radicalism, followed by understanding the concept of intolerance. While in the main focus the discussion will

surfaces three strategic policy of the state namely strengthening the ideology of of tolerance, the revitalization of the values of Pancasila, and the empowerment of civil society, and finally the conclusion.

Keyword: Policy, Youth, Tolerance, violence.

Abstrak

Lembaga pendidikan dianggap sebagai alat yang strategi untuk jangka panjang dalam mengatasi permasalahan tentang kekerasan dan radikalisme agama yang ramai pada paska reformasi politik. Menciptakan kepastian dari proses pendidikan secara positif itu sama seperti mengukur masa depan para generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seharusnya dapat menciptakan generasi perdamaian. Hal tersebut seharusnya menjadi tugas kolektif dan kewajiban untuk membangun gerakan pemecah dari regenerasi radikalisasi diantara generasi muda melalui proses pendidikan yang dilakukan melalui penguatan dan penataan dalam memahami ilmu di berbagai disiplin ilmu yang dipelajari oleh para siswa dan mahasiswa. Sehingga apa yang harus diatur dan diselaraskan tidak hanya mata pelajaran ataupun pelajaran agama khususnya. Tetapi semua sumber dan mata kuliah perlu disampaikan secara humanis dan pendekatan toleransi berdasarkan penguatan mental dan karakter siswa dan mahasiswa. Tulisan ini akan mencoba mengulas beberapa aspek yang bisa diadopsi oleh pemerintah dalam rangka menghadapi ancaman fenomena radikalisme pada kaum muda di lembaga pendidikan. Sebelum fokus pada poin utama, pembahasan akan dilakukan dengan masalah konseptualisasi. Konseptualisasi tersebut dimulai dengan pemahaman tentang konsep radikalisasi agama, diikuti dengan pemahaman konsep toleransi. Sementara di poin utama, pembahasan akan muncul 3 kebijakan strategi Negara yaitu penguatan ideologi toleransi, dan revitalisasi

nilai-nilai Pancasila, dan pemberdayaan masyarakat sipil, dan akhirnya kesimpulan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemuda, Toleransi, Kekerasan

A. PENDAHULUAN

Sejak reformasi digulirkan yang ditandai dengan semangat demokratisasi, serta merta saja muncul keinginan untuk menjadikan agama sebagai dasar negara yang disertai dengan maraknya paham radikal. Gelombang gerakan ini memang tidak terlepas dari situasi politik pasca reformasi. Menurut Nur Syam, setidaknya sejak 2001 hingga 2010 berbagai gerakan pro syari'at muncul, seperti penerapan syariah Islam di Nangroe Aceh Darusalam, lalu muncul berbagai Perda syariat di antaranya adalah di Tangerang, Sumatera Barat, Cianjur, Solok, Padang Pariaman, Padang, sampai Enrekang. Munculnya Perda-Perda tersebut pada masa awal reformasi berkorelasi dengan suburnya berbagai gagasan praksis mengenai penerapan syariah secara kaffah dan keinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah dalam negara yang diindikasikan belum Islami.¹

Nampak bahwa gerakan keagamaan yang mengusung ideologi agama sangat kuat mempengaruhi realitas empiris politik era reformasi. Sistem cell yang dikembangkan oleh gerakan ini telah memasuki ruang-ruang di dalam berbagai golongan masyarakat. Akibatnya terjadi polarisasi di antara umat beragama khususnya umat Islam. Militansi keagamaan yang tidak didasari oleh semangat mentoleransi perbedaan faham keagamaan dan *truth claimed* yang berlebihan seringkali menjadikan mereka terjebak di dalam kubangan membenaran diri sendiri secara berlebihan.²

1 Nur Syam, *Mewaspadai Ideologisasi Agama*, www.lkassurabaya.blogspot.com, 10 Agustus 2007, diakses tanggal 23 Februari 2015.

2 Angel Rabasa (et al.), *Deradicalizing Islamist Extremists*, National Security Research Division, Pittsburgh, 2010 h. 27.

Fajar Riza Ul Haq sebagaimana dikutip Nur Syam menyebutkan bahwa fenomena radikalisme berkorelasi dengan menguatnya gejala konflik sektarian. Pendapat ini dikuatkan dengan dua alasan: *Pertama*, terjadi perebutan otoritas atas tafsir ajaran agama (Islam) yang kian terbuka dan keras di antara kelompok / organisasi Islam, sebagai contohnya adalah penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas agama milik Ahmadiyah. *Kedua*, model pemahaman Salafisme dan Wahabisme dari jalur penyebaran Timur Tengah tumbuh subur berproduksi di intitusi-institusi keagamaan dalam negeri. Arus baru inilah yang menggeser corak Islamisasi akar rumput yang sebelumnya diarsiteki oleh NU dan Muhammadiyah.³

Dalam rangka merespon ancaman yang diakibatkan oleh berkembangnya paham dan sikap radikal tersebut, lembaga pendidikan dinilai sebagai alat strategis jangka panjang dalam mengatasi problem kekerasan dan intoleransi ini. Karena itu, lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal harus bisa mencetak generasi yang toleran, bukan sebaliknya.⁴

Demi menjamin masa depan generasi muda, sangat penting untuk membangun gerakan pemutus regenerasi paham radikalisme, di setiap jalur pendidikan dilakukan penguatan dan penataan pemahaman dalam berbagai disiplin ilmu yang dipelajari oleh siswa dan mahasiswa. Sehingga yang ditata dan diluruskan bukan hanya pelajaran atau mata kuliah agama saja, melainkan semua mata kuliah perlu disampaikan dalam pendekatan yang humanis dan toleran dengan berbasis pada penguatan mental dan karakter nasionalisme mahasiswa.

Sejauh ini penanggulangan terhadap radikalisme telah dilakukan dengan menempuh berbagai cara dan pendekatan dengan melibatkan pihak-pihak yang potensial. Hasil penelitian juga cukup banyak mengkaji tentang penyebab munculnya radikalisme. Namun ternyata arus radikalisme nampaknya belum surut, meskipun

3 I Ketut Widnya, *Mencari Penyelesaian Konflik Keagamaan di Indonesia: Sebuah Refleksi Dari Pengalaman Sejarah Hindu*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia" Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, h. 3.

4 *Ibid.*

negara dengan segala kekuatan yang dimilikinya berusaha keras memburu kelompok radikal sampai ke akarnya. Tulisan ini akan mencoba untuk meninjau beberapa aspek yang dapat diadopsi oleh negara dalam rangka menanggulangi fenomena radikalisme kaum muda di lembaga pendidikan. Sebelum pembahasan akan dilakukan konseptualisasi permasalahan. Konseptualisasi ini diawali dengan pemahaman tentang konsep radikalisme agama, kemudian dilanjutkan dengan memahami konsep intoleransi. Sedangkan pada pembahasan akan dibahas tiga langkah strategis kebijakan negara yaitu penguatan ideologi toleransi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pemberdayaan masyarakat sipil, hingga akhirnya kesimpulan.

B. KONSEPTUALISASI PERMASALAHAN

1. Memahami Konsep Radikalisme Agama

Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya.

Proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu, sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan.⁵ Terbentuknya radikalisme dicapai melalui proses radikalisasi, dimana terdapat 5 (lima) aspek yang memiliki peranan penting selama proses tersebut berlangsung, yaitu:

⁵ Barry Rubin (Editor), *Guide to Islamist Movements (volume 1)*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2010, h xiii.

Pertama, proses individu. Radikalisasi dipandang sebagai salah satu proses pencarian identitas bagi individu (anak muda pada umumnya). Bagi anak muda, pencarian identitas merupakan bagian dari proses mendefinisikan hubungan seseorang dengan dunia. Dinamika interpersonal memerlukan interaksi interpersonal dengan aktor-aktor lain untuk merangsang dan mempengaruhi proses pemahaman/pemikiran individu yang menjadi target radikalisme.

Kedua, pengaruh lingkungan. Narasi dan kosa kata politik organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat dapat menjadi masukan narasi bagi kelompok-kelompok radikal.

Ketiga, faktor emosi keagamaan. Sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Pada konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif.

Keempat, faktor ideologis. Ketidakmampuan dalam memosisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban, membuat kelompok radikal menempuh jalur kekerasan untuk menunjukkan keberadaan/hegemoni kebudayaan mereka. Contoh ideologi anti Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan bagi kelompok agama tertentu.

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan akibat dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Di samping itu, faktor media massa (pers) asing yang selalu memojokkan agama tertentu juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal.⁶

Terdapat 2 (dua) tipe proses radikalisasi yang umum terjadi, *pertama* akibat krisis identitas yang diselesaikan dengan pemahaman keyakinan yang menyatakan kekerasan

⁶ Barry Rubin and Judith Colp Rubin, *Chronologies of Modern Terrorism*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2008, h. 3.

sebagai solusi, dimana umumnya berakar pada kekhawatiran tentang kondisi makro seperti integrasi, kebijakan luar negeri, perkembangan politik, budaya, dan ekonomi global. Sedangkan proses radikalisasi yang *kedua* dihasilkan dari dinamika interaksi sosial pada kondisi mikro yang dipengaruhi oleh media, teman sebaya, pemimpin, anggota keluarga, atau lingkungan sekitar, sehingga menerima sistem kepercayaan/pemahaman bahwa sesuatu dapat dan harus dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap aliran kepercayaan atau pemahaman yang diyakininya.

Munculnya radikalisme keagamaan terjadi akibat hal-hal berikut : 1) Klaim kebenaran Pemeluk agama meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan kebenaran monolitik (tunggal), dimana sering terdapat penafsiran yang menganggap bahwa agama lain adalah tidak benar. 2) Ketaatan “buta” terhadap pemimpin agama. Fanatisme berlebihan terhadap pemimpin agama, sehingga perkataan pemimpin agama “dianggap” sebagai kebenaran yang hakiki.⁷

Sementara menurut Haryatmoko, radikalisme tumbuh dari proses ideologisasi yang berlebihan terhadap keyakinan agama. Menurutnya agama memperteguh motivasi setiap pemeluknya. Alasannya: *Pertama*, agama memberi identitas karena akta pendirian suatu kelompok diaktualisasikan kembali dengan representasi diri. *Kedua*, agama menumbuhkan keyakinan bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam hidupnya. *Ketiga*, acuan ke tujuan terakhir memberi pembenaran dan mendasari sikap kritis terhadap tatanan yang ditolaknya (Ricoeur, 1986). Bahaya pada semua agama ialah direduksi hanya menjadi ideologi. Dasar ideologi kekerasan adalah teror. Teror memberi pembenaran terhadap semua bentuk kejahatan atas nama ideologi.

Maka kesuksesan ideologi radikalisme adalah kemampuannya dalam memberi kepastian. Dalam ketidakpastian ekonomi global yang melahirkan pengangguran dan ketidakadilan, radikalisme

7 Adi Sulistyono, *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, wordpress.com, 12 Februari 2014.

agama menjajankan ekonomi adil dan persaudaraan melalui revolusi moral. Dengan cara ini, radikalisme memberi identitas pasti. Bukan hanya memberi janji, namun menjamin, bukan atas dasar analisa namun melandaskan pada keyakinan.

Kaum radikal memiliki keyakinan bahwa dunia hanya terdiri dari dua kelompok, yaitu baik dan jahat (agama pilihan dan musuh). Kepastian diberikan kepada pemeluk agama pilihan. Janji akan masa depan tanpa kesusahan dikaitkan dengan pemisahan baik dan jahat. Pemisahan ini berfungsi untuk setanisasi musuh. Pembunuhan musuh lantas dibenarkan karena musuh adalah negasi terhadap nilai-nilai agama pilihan.⁸ Maka tidak mungkin ada perdamaian dengan orang-orang bukan pemeluk agama pilihan.

Ramalan bahwa musuh agama pilihan akan binasa menjadi alat pembenaran untuk melakukan apa saja, termasuk kekerasan dan pembunuhan. Selanjutnya logika kekerasan yang memuncak pada pembunuhan mendasarkan diri pada tiga mekanisme: yaitu penunjukan kambing hitam, radikalisasi, dan pembunuhan. Hipotesisnya adalah krisis menciptakan situasi kondusif bagi tumbuhnya radikalisme agama.⁹

2. Mengenal Konsep Intoleransi

Kelompok-kelompok yang kerap menebarkan kebencian yang disertai dengan kekerasan selalu menggunakan paham keagamaan dan keyakinan untuk menjustifikasi tindakannya. Konsekuensinya, agama yang semestinya mengajak kepada keadilan dan kedamaian berubah menjadi instrumen yang ampuh untuk mengobarkan kebencian dan kekerasan. Menurut Amartya Sen, saat agama digunakan sebagai identitas soliter, maka di situlah agama menjelma sebagai energi bagi

8 Barry Rubin (Editor), *Guide to Islamist Movements (volume 1)*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2010, h. xiii. Barry Rubin and Judith Colp Rubin, *Chronologies*, h. 3.

9 Haryatmoko, *Agama-Agama dan Masalah Kekerasan: Proses dari Imajiner Sosial ke Kekerasan*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia" Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, h. 5.

tumbuhnya kekerasan. Lihat misalnya, takbir atau kalimat Allahhu Akbar yang biasa diucapkan saat melakukan shalat untuk mengagungkan Tuhan justru digunakan oleh sebagian kelompok untuk mengabsahkan kebencian dan kekerasan.

Fungsionalisasi simbol dan paham keagamaan sebagai pemantik intoleransi merupakan fakta yang mesti diwaspadai. Muhammad Arkoun dalam *al-Fikr al-Ushuly wa Istihalat al-Ta'shil* menggambarkan agama sebagai domain yang sakral dapat dijadikan sebagai alat untuk mensakralkan kekerasan. Hal tersebut terjadi tidak hanya dalam sejarah Islam, melainkan dalam sejarah agama-agama samawi dan non-samawi. Karenanya, menjauhkan agama dari fungsionalisasi dan politisasi kekerasan merupakan sebuah keniscayaan agar agama berperan bagi pencerahan umat dalam rangka menegakkan keadilan dan kedamaian.¹⁰

Menurut Zuhairi Misrawi, intoleransi merupakan tindakan yang mengingkari hidup bersama dalam damai. Intoleransi menegasikan toleransi. Sebagai sebuah tindakan yang dapat mengganggu hidup rukun, intoleransi tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan sebuah perbuatan yang dibangun oleh gejala-gejala sosial yang secara terang-benderang telah mendorong tumbuhnya intoleransi.

Karuna Center for Peacebuilding menggambarkan pola-pola yang menandakan tingkat intoleransi dalam sebuah masyarakat. *Pertama*, penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*). Dalam beberapa kasus, intoleransi dilakukan dalam bentuknya yang sangat halus, yaitu melalui kebijakan publik yang tidak memberikan akses yang sama terhadap kelompok minoritas, atau mereka yang diidentifikasi menyimpang. Fakta tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan akses yang sama, karena dianggap sebagai “kelompok sesat”.

10 Zuhairi Misrawi, *Kontestasi Toleransi dan Intoleransi Bernuansa Agama*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, h. 2-4.

Kedua, pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*dehumanization*). Dehumanisasi menjadi salah satu bentuk intoleransi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat telah direndahkan akibat segregasi sosial yang dikonstruks oleh kelompok tertentu. Dehumanisasi terjadi karena ada pandangan hegemonik yang diciptakan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika demokrasi dipahami dalam koridor prosedural yang hanya memandang pentingnya kuantitas dan mengabaikan kualitas, kerap kali menjadikan demokrasi sebagai ancaman bagi toleransi. Konsekuensinya, dehumanisasi menjadi fakta yang tidak bisa terelakkan.

Ketiga, pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*). Operasi umumnya merupakan kelanjutan dari menggumpalnya restriksi dan dehumanisasi. Di masa lalu, rezim otoriter kerap kali melakukan tindakan yang mencederai hak-hak sipil, politik, dan ekonomi. Tetapi di dalam rezim yang dipilih secara demokratis pun, operasi secara telanjang terjadi, karena pemerintah takut terhadap tekanan dari “kelompok mayoritas” dan kerap kali pencitraan dan kalkulasi politik menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini, intoleransi lahir akibat kelalaian negara, bahkan pembiaran negara dalam melindungi setiap warganya.

Keempat, penyerangan dan melakukan upaya pembunuhan (*act of aggression*). Penyerangan dan pembunuhan merupakan salah satu tindakan intoleran yang paling mengerikan, karena intoleransi telah menjelma menjadi tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Penyerangan dan pembunuhan terjadi umumnya karena lemahnya penegakan hukum dan berpihaknya negara terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan intoleransi sebagai ideologinya. Pada tahap ini, intoleransi merupakan ancaman yang sangat serius, karena mulai menciptakan rasa tidak aman bagi kelompok lain, terutama bagi para korban.

Kelima, pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-*

violence). Salah satu bentuk pembunuhan massal yang paling mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu terorisme. Dalam setiap tindakan terorisme, selalu ada korban yang berjatuh yang meninggalkan kecemasan, keakutan, dan ketidakamanan. Terorisme dapat mengancam, baik negara maju seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa, maupun negara-negara berkembang seperti Turki, Mesir, dan Indonesia.

Keenam, pembasmian atas dasar identitas (*genocide*). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di Jerman merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu. Tindakan ini merupakan bentuk intoleransi yang paling buruk, karena meninggalkan trauma yang amat panjang bagi korban. Apalagi trauma tersebut mampu membangun kesadaran intoleransi bagi mereka. Harus diakui, bangsa ini belum mengalami intoleransi model ini, meskipun kecenderungan ke arah itu mulai terlihat.¹¹

Beberapa penjelasan di atas dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melihat sejauh mana intoleransi dipraktekkan dalam sebuah masyarakat. Ide dasarnya, bahwa jika sebuah negara menerapkan toleransi dengan baik, maka negara tersebut akan semakin mampu mengatasi problem intoleransi yang akan mengancam. Sebaliknya, jika yang dominan adalah intoleransi, maka toleransi akan mendapat tantangan yang sangat serius.¹²

C. PEMBAHASAN

Dalam rangka memperkuat kebijakan negara dalam penanggulangan radikalisme di lembaga pendidikan, pembahasan dalam tulisan ini mencoba untuk mengupas apa dan sejauh mana langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh negara dalam rangka menghalau laju perkembangan radikalisme di lembaga pendidikan melalui penguatan ideologi toleransi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

11 Ismail Hasani, *Berpihak dan Bertindak Intoleransi*, h. 36.

12 Zuhairi Misrawi, *Kontestasi Toleransi dan Intoleransi*, h. 2-4.

1. Memperkuat Ideologi Toleransi

a. Menjadikan Lembaga Pendidikan Sebagai Basis Kehidupan Toleransi

Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan dan keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi secara cepat dan tepat. Menurut Ahmad Baedowi dengan mengutip Steven E. Vinkel dalam *Can Tolerance be Taught? Adult Civic Education and the Development of Democratic Values* (2000),¹³ proses pendidikan yang menghargai keragaman, memiliki proses demokratis dan terbuka serta peduli akan tumbuh kembang mental attitude siswa dan mahasiswa adalah prasyarat yang dibutuhkan dalam membangun semangat toleransi. Steven E. Vinkel menyebutkan bahwa mengajarkan toleransi merupakan pintu masuk utama dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang demokratis dan terbuka.

Sekolah dan kampus yang proses belajar mengajarnya memiliki ruang kelas yang demokratis biasanya dicirikan oleh adanya kesadaran guru dan dosen akan keunikan masing-masing peserta didik dimana biasanya hal ini ditunjukkan dengan tanggung jawab para peserta didik terhadap beban belajar masing-masing. Selain itu baik peserta didik maupun para guru dan dosen terbiasa dengan model untuk memaklumi kesalahan dan belajar dari kesalahan serta belajar bagaimana mengelola perbedaan secara konstruktif. Selain itu ciri yang menonjol adalah sikap yang dapat ditunjukkan para peserta didik di kelas baik ketika belajar mandiri maupun belajar kelompok.

Proses komunikasi dalam sebuah kelas yang demokratis juga dapat dilihat dari bagaimana proses komunikasi berlangsung dan terjalin. Jika di antara guru dan siswanya terbiasa untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan

¹³ Ahmad Baedowi, *Paradoks Kebangsaan Siswa Kita*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol. 8, No 1- Juli 2013, h. 77-78.

langsung, maka dapat dipastikan bahwa ruang kelas tersebut sangat demokratis. Mereka akan mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, di mana antara guru dan siswa akan berbagi tanggungjawab untuk saling belajar, saling menolong, saling mendengarkan, bersikap empati serta tidak mengesampingkan pendapat orang lain. Membangun kelas yang demokratis dapat dimulai oleh seorang guru dengan melakukan assessment terhadap kemampuan siswa yang sangat beragam.

Seorang guru harus berusaha menolong muridnya dalam mengidentifikasi tujuan akademis mereka minimal untuk satu tahun ajaran. Semacam *collaborative goal setting* harus dilakukan. Selain itu penting bagi para guru kita untuk membangun perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan kelas demokratis yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Para guru juga harus mampu melayani dalam setiap level status kepemimpinan, baik ketika berperan sebagai guru, fasilitator, orangtua, bahkan teman bagi siswa.

Dengan demikian guru tersebut memiliki kesadaran untuk memilih kurikulum dan materi yang sesuai dengan tingkat keunikan dan kemampuan siswa-siswa mereka yang memiliki gaya kognitif, afektif dan psikomotorik yang berbeda satu sama lain. Meminjam kata-kata Albert O. Hirschman dalam *A Bias for Hope* (1971), gaya kognitif, afektif dan psikomotorik sekalipun harus bertumpu pada yang *possible*, bukan yang *probable*. Beragam kemungkinan (*possible*) tersebut bisa didapati ketika sekolah, dengan kesadarannya yang tinggi, selalu berusaha untuk mengembangkan komunikasi lintas budaya, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan guru. Harus diingat bahwa sekolah adalah katalis kuat dalam membangun pemahaman dan persatuan komunitas.

Sekolah juga harus memiliki keinginan kuat untuk mengakui bahwa pendekatan setiap orang berasal dari perspektif yang unik, dan karena itu setiap bentuk konflik yang terjadi di sekolah harus dimanfaatkan sebagai

suatu kesempatan untuk memahami perbedaan pandangan. Sekolah juga harus terbiasa untuk memiliki kepekaan mendengarkan bisikan-bisikan sebelum menjadi teriakan, serta memahami bahwa perbedaan budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda pula. Karena itu sekolah harus selalu berusaha menciptakan dan menegakkan kebijakan yang tidak mentolerir diskriminasi, membangun koalisi yang terdiri dari berbagai segmen dalam komunitas, serta mengembangkan keterlibatan para orang tua dan murid yang minoritas. Di atas semuanya, sekolah harus memiliki sistem penanganan konflik secara terpadu seperti manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS), agar sekolah selalu siaga terhadap segala jenis ketegangan rasial.

Budaya sekolah harus mampu mengelola kemajemukan berdasarkan kekuatan karakteristik budaya lokal masyarakat di mana sekolah itu berada. Budaya sekolah yang menerima kemajemukan adalah pertanda bahwa komunitas sekolah tersebut memiliki kesadaran akan efek manfaat dan kegunaan budaya sekolah dalam membentuk watak dan karakter siswa yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian budaya sekolah sangat baik karena memiliki standar isi dan standar kompetensi yang jelas dalam kurikulum.

Inilah proses pendidikan yang dapat dikembangkan oleh para guru dan dosen di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi. Titik tekan proses pendidikan adalah adanya kesadaran untuk melakukan penyadaran kepada para guru / dosen dan siswa / mahasiswa secara terus menerus tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kemajemukan tersebut yang sekaligus menjadikan komunitas lembaga pendidikan sebagai basis utama kehidupan toleransi. Oleh karena itu pengintegrasian materi agama dan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Salah satu makna penting pengintegrasian pengajaran agama dan kewarganegaraan ke dalam satu paket adalah dalam rangka menumbuhkan semangat toleransi dan

kebersamaan siswa sebagai anak bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, diharapkan pengajaran agama dan kewarganegaraan dapat meredam semangat tirani mayoritas yang cenderung melegalkan dan menganggap segala sesuatunya sebagai milik mayoritas. Dengan demikian pengajaran agama dan kewarganegaraan berpotensi untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*) yang memiliki sikap toleransi yang kuat dalam menopang semangat nasionalisme dan persatuan. Prinsip-prinsip *good citizenship* yang diambil dari proses pengajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan juga akan membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses politik secara sehat, karena basis pengetahuan mereka secara agamis dan ketatanegaraan pasti akan lebih baik.

Pengintegrasian tersebut juga diharapkan akan mampu mendorong sikap-sikap siswa yang lebih toleran dalam rangka membantu penguatan sistem demokrasi yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia (Elizabeth Theiss-Morse and John R. Hibbing: *Citizenship and Civic Engagement*, 2005). Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, tradisi dan bahasa yang sangat banyak dan beragam, sudah selayaknya untuk mensyukuri dan menjaga dengan sepenuh hati keragaman tersebut. Salah satu cara yang paling kuat dan strategis dalam menjaga kemajemukan ini adalah proses pendidikan yang benar. Titik tekan pada kata “proses pendidikan” adalah adanya kesadaran untuk melakukan penyadaran kepada para guru / dosen dan siswa / mahasiswa secara terus menerus tentang pentingnya menjaga, melestarikan, dan merayakan secara bersama kemajemukan tersebut dalam rangka menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis utama kehidupan toleransi.

b. Membangun Islam Indonesia Yang Toleran

KH. Hasyim Muzadi, pernah mengatakan bahwa Indonesia dengan *Bhineka Tunggal Ika*-nya merupakan negara

paling toleran jika dibanding negara-negara lain di dunia.¹⁴ Secara konseptual, toleransi sendiri dimaknai sebagai sikap mengakui dan menghargai eksistensi non-muslim dan agama yang dianutnya, tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam karena tidak ada paksaan dalam agama, memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu dan mengusik ketenangan pemeluk agama lain, namun juga mengambil sikap tegas untuk berlepas diri dalam urusan-urusan yang termasuk ranah akidah dan agama mereka. Meskipun penting untuk dicermati, toleransi tidak dimaknai sebagai upaya mencampuradukkan keyakinan, ritual ibadah, tradisi dan simbol-simbol antar agama-agama. Toleransi dilandaskan pada pengakuan terhadap keberagaman (pluralitas).

Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Toleransi juga merupakan bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.

Kemampuan para ulama dalam menerjemahkan ajaran agama dalam bingkai “Islam Indonesia” lahir dari kesadaran sosial dan sejarah yang panjang. Sejumlah tokoh ulama dan intelektual muslim di Indonesia nyatanya telah berhasil menjadi jembatan antara kepentingan agama dan kepentingan negara dengan menjadikan kepentingan publik (umat) sebagai pondasi keduanya. Terkait kesadaran sosial, historis, para ulama dapat tercermin dari penerimaan

¹⁴ Anonymous, *Membangun Toleransi Beragama*, 26 April 2013. Diunduh dari <http://www.harianhaluan.com>, tanggal 11 Januari 2016.

asas kenegaraan yang berlandaskan Pancasila. Penerimaan demokrasi dan Pancasila lahir dari sejumlah pergumulan para ulama dan intelektual muslim tentang ada atau tidaknya perintah agama yang syari'ah terkait bentuk negara.

Para intelektual muslim dan ulama adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing masyarakat / umat. Almarhum Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) misalnya, seorang intelektual ulama yang sangat kharismatik mengemukakan bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara juga merefleksikan ajaran dari semua agama (di dalam Islam dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* atau kemaslahatan umat). Lebih lanjut diterangkan bahwa Pancasila mampu menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan pada seluruh makhluk (*rahmatan lil-'alamin*). Oleh sebab itu setiap orang bisa saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi, dan setiap orang bebas beribadah untuk meraih kesejahteraan *ukhrawi* tanpa mengabaikan satu sama lainnya.

Sebaliknya Gus Dur memandang aktivitas yang dilakukan oleh gerakan Islam Transnasional yang masuk lewat Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ke Indonesia cenderung merusak nilai-nilai Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gerakan tersebut seringkali menggunakan konsepsi *kafir*, *murtad* (sebagai simbol keagamaan) untuk menyingkirkan orang lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Islam Transnasional tersebut. Gus Dur menerangkan bahwa keselamatan (surga) tidak ditentukan oleh klaim seperti itu, melainkan lewat ketulusan dan keikhlasan dalam beragama dengan berserah diri dan patuh pada apa yang diajarkan oleh (Tuhan) *Allah swt*. Dalam hal ini mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dimana ia menegaskan hal tersebut menggunakan konsepsi *man kaffaraakhahu bi-ghairi ta'wil fa huwa kama qala* yang memiliki makna implisit bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengkafirkan

saudaranya tanpa penjelasan yang nyata.¹⁵

Pemikiran Gus Dur yang paling dikenang oleh para pengikutnya ialah Gus Dur ingin memperkenalkan Islam sebagai agama yang terbuka, adil, dan toleran. “Terbuka” terhadap kritik dan saran sebagai bentuk perbaikan terhadap perkembangan kehidupan Islam dan kemajemukan Indonesia, lalu “adil” diartikan sebagai aktivitas yang tidak merugikan masyarakat banyak. Dan “toleran” terhadap terhadap keanekaragaman yang terjadi di masyarakat.

Gus Dur juga dikatakan memiliki sudut pandang tersendiri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, oleh karena itu ia menolak penyeragaman budaya (termasuk agama) sebagai tindakan yang tidak berbudaya.¹⁶ Oleh sebab itu sikap toleransi terhadap keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi perlu untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan sebagai bangsa yang majemuk. Sehingga gerakan membangun Islam Indonesia yang bernafas toleran menjadi sebuah kewajiban dalam menata Indonesia yang demokratis.

2. Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Pasca Orde Baru ideologi global masuk dengan deras dan mempengaruhi anak bangsa. Cita-cita dan semangat utama bangsa tertutup timbunan ideologi luar. Dengan kondisi ini, negara dituntut untuk menyegarkan kembali ajaran Pancasila bagi warga negara, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya melalui upaya sistematis pada kurikulum pembelajaran pada semua tingkat satuan pendidikan.

Pada masa Orde Baru, upaya pemerintah untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7. Badan tersebut

¹⁵ Daniel Maringan Tua, *Penguatan Peran Ulama dan Filter Ajaran Gerakan Islam Transnasional*, wordpress.com, 23 Januari 2015. Diunduh dari <https://danielmaringantua.wordpress.com> tanggal 11 Januari 2016

¹⁶ Santoso Listianto, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta, Ar Ruuz, 2004, h 118. Sebagaimana dikutip Daniel Maringan Tua, *Ibid*.

merupakan penanggung jawab (*leading sector*) terhadap perumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka, dan sedang digempur oleh pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme, sosialisme, humanisme, nihilisme, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila, ditujukan agar tetap responsif menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme lebih ditekankan pada penyampaian tiga pesan berikut:

- a. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu.
- b. Aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum.
- c. Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, serta berkeadaban.

Maka dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan gerakan massif berupa pemeliharaan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. Sedangkan salah satu unsur ketahanan

nasional adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi ditingkatkan dalam bentuk :

1. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif
2. Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru
3. Pengembangan dan penanaman nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam seluruh kehidupan berbangsa, bermasyarakat.¹⁷

Terkait dengan upaya merevitalisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut, Azyumardi Azra menilai ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat yang membuat Pancasila masih marjinal dalam hiruk pikuk perkembangan politik Indonesia. *Pertama*, dalam ingatan bersama banyak kalangan, Pancasila masih dipandang tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan *status quo* kekuasaan. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang diindoktrinasikan melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Kedua, liberalisasi politik di era Presiden Habibie dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi, telah memberikan peluang bagi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. *Ketiga*, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal yang tumpang tindih dengan etno-nasionalisme dan bahkan sentimen agama.

Faktor-faktor tersebut berdampak kurangnya perhatian publik terhadap Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan garis haluan bersama dalam kehidupan negara Indonesia merupakan aktualisasi tekad bersama segenap warga untuk tetap bersatu ditengah berbagai keragaman. Pancasila sebagai kerangka dan dasar ideologis bangsa Indonesia merupakan sebuah *ideology*, ideologi yang tidak berbasiskan agama manapun. Khususnya

¹⁷ Abdurrahman, *Peran Serta Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme*, 1 Mei 2015. Diunduh dari <http://abdurrahman001.blogspot.co.id> tanggal 11 Januari 2016.

dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sesuai dengan ajaran agama-agama. Mark Juergensmeyer, pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah rahmat terselubung bagi bangsa Indonesia. Tidak ada alasan yang valid untuk mengganti pancasila dengan ideologi lainnya.¹⁸

Pancasila adalah adalah dasar dan prinsip hidup bernegara di Indonesia, dimana persatuan dan kesejahteraan bangsa menjadi poros utamanya. Karenanya tidak berlebihan untuk menyebut Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang akan terus dijaga dan diwujudkan. Pengetahuan yang memadai terhadap Pancasila akan melahirkan jati diri bangsa, cinta tanah air, dan semangat nasionalisme kebangsaan, sehingga masyarakat akan cermat dan tidak mudah disusupi paham-paham ekstrem dan radikal.

3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil

Selain fokus pada upaya revitalisasi ideologi Pancasila, sejauh ini pemerintah juga telah berupaya memperkuat keterlibatan masyarakat sipil (*civil society*) dalam menangkal penyebaran paham radikal. Upaya ini sebagai bagian dari pelibatan *multi-stake holder* yang mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat basis moderasi di kalangan masyarakat sipil Indonesia. Sehingga nantinya kebijakan ini diharapkan akan memperkuat kontra-narasi terhadap ideologi terorisme dan radikalisme.

Pemerintah melalui aparat penegak hukum secara simultan melakukan pengkajian serta melakukan pemantauan terhadap wilayah tertentu terutama pada cara pemahaman masyarakat yang terlalu awam terhadap hakekat dari keamanan guna menghindari usaha-usaha provokasi dan penyebaran paham berbahaya. Di samping itu pemerintah juga melakukan pencegahan terhadap resiko adanya gangguan keamanan guna mengurangi dampak negatif.

¹⁸ Anonymous, *Revitalisasi Pancasila Sebagai Solusi Atas Permasalahan Yang Dihadapi Bangsa Indonesia*, 15 Desember 2011. Diunduh dari www.wordpress.com tanggal 4 Oktober 2015.

Program pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme dicanangkan dan dilakukan secara berkelanjutan serta didukung oleh semua komponen sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan termasuk kemampuan pemerintah mengambil keputusan strategis. Telah banyak rencana teror yang mampu digagalkan berkat bantuan dan laporan dari masyarakat. Salah satu upayanya dengan membentuk FKPT (Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris) di daerah-daerah guna lebih dapat mengantisipasi berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Menurut Agus Surya Bakti, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan strategi kontra radikalisasi atau penangkalan ideologi yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat. Strategi itu dilaksanakan untuk menguatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap penyebaran paham radikal terorisme sekaligus menguatkan wawasan kebangsaan, khususnya kepada pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Implementasi strategi kontraradikalisasinya adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. Pembentukan FKPT bertujuan menyinergikan upaya pencegahan terorisme yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal guna menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat yang berperan penting sebagai garda terdepan dalam rangka pencegahan terorisme di daerah.

Menurut Agus, sifat FKPT adalah forum koordinasi nonpartisan. Kehadirannya diharapkan mampu menjalin koordinasi terpadu dan integratif dengan elemen pemerintah daerah: kanwil kesbangpolinmas, kanwil dikdasmen, kanwil dikti, kanwil agama, kanwil hukum dan HAM, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta sivitas akademika yang menjadi determinan dalam upaya mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme di daerah.

Dengan dibentuknya FKPT ini, pencegahan terorisme dapat dimulai secara dini dari pekarangan terdepan. Peran strategis FKPT melakukan koordinasi pencegahan terorisme diharapkan terjalin secara terpadu dan terintegrasi, melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Itu diharapkan dapat tercapai mengingat FKPT terbentuk dari perwakilan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, dan media massa yang tentu berpengaruh bagi masyarakat di lingkungannya.¹⁹

Untuk mengeliminir gerakan radikalisme dan terorisme diperlukan kewaspadaan aparat dan masyarakat terhadap kegiatan oleh sekelompok orang, dengan mencermati gelagat, aktivitas, dan perkumpulan. Menurut analisis militer, kaum radikal yang gemar menebar teror untuk mencapai tujuan politiknya menggunakan berbagai macam cara yang meliputi:

1. Menggumpulkan informasi, publikasi, komunikasi internal, pelatihan, radikalisasi, penghasutan, pengorganisasian dan penguasaan dunia maya (internet) yang disebarakan melalui selebaran atau pesan singkat (SMS).
2. Radikalisasi yang mengatasnamakan agama menciptakan kekerasan tidak saja terhadap agama berbeda tapi juga sesama agama, pendanaan didapat dari cara Multi Level Marketing (MLM), narkotika dan segala cara yang dianggap halal.
3. Propaganda kelompok teroris melalui penyebaran buku jihad, website, sosial media dan radio, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

FKPT yang dibentuk pemerintah pada berbagai daerah adalah senjata sosial (*social capital*) paling massif untuk memerangi radikalisme dan terorisme karena terdiri dari semua unsur, instansi terkait dan tokoh masyarakat serta sebagai perpanjangan tangan dan mitra strategis BNPT maupun Pemda di daerah yang bersifat koordinatif dan sinergis antara TNI, Polri dan pemangku adat. Membangun sinergi antara TNI-

¹⁹ Agus Surya Bakti, *Pencegahan Terorisme Bersifat Semesta*, Kompas 2 Agustus 2013. Diunduh dari www.hariankompas.com tanggal 19 Januari 2016.

Polri dan komponen masyarakat (*civil society*) bertujuan untuk mendorong peningkatan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme sejak dini yang berbasis kearifan lokal melalui :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama melalui pendidikan formal dan non formal dengan selalu mewaspadaai kemungkinan timbul dan berkembangnya paham radikal yang menyimpang dari ajaran agama.
2. Peningkatan pengamalan dan hazanah budaya bangsa untuk mencegah radikalisme dan terorisme melalui pemberdayaan lembaga sosial dan lembaga adat.
3. Menjalani kerjasama dengan media massa dalam rangka penguatan kewaspadaan dan kepedulian serta daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh radikalisme.
4. Peningkatan kapasitas dan peran pemuda, perempuan, LSM, toko adat, toko agama, toko masyarakat dalam rangka penguatan masyarakat untuk mencegah radikalisme.
5. Melakukan penelitian pengkajian gejala dan potensi terjadinya radikalisme dan terorisme serta mengembangkan model-model pencegahan, diantaranya temu cepat lapor cepat oleh masyarakat, proaktif jika memandang, merasakan gerakan-gerakan aneh disekitarnya.
6. Membangun pola kerjasama dan koordinasi yang ideal, serta mengefektifkan pencegahan radikalisme dan terorisme berbasis pendekatan kearifan lokal.²⁰

Melalui FKPT, diharapkan nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat di setiap daerah dapat diperkuat dan diinternalisasikan kembali dalam setiap lini kehidupan melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan segenap komponen bangsa. Karena itu, beberapa program yang dilaksanakan FKPT di daerah sedapat mungkin dirumuskan dengan berbasis pada penerapan nilai kearifan lokal dan nilai-nilai

²⁰ Wing Handoko, *Membangun Sinergitas TNI-POLRI dan Masyarakat Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme*, 11 November 2012. Diunduh dari www.wordpress.com tanggal 19 Januari 2016.

Pancasila. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa kesadaran masyarakat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila mulai kembali timbul. Jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa 92,5 persen responden menyatakan perlunya dilakukan penguatan terhadap ideologi Pancasila. Telah muncul kesadaran memasukkan nilai luhur dalam Pancasila dengan pendekatan baru yang menekankan pada semangat edukasi dan bukan indoktrinasi.

Forum ini juga dapat berperan sebagai fasilitator yang menanamkan kedamaian dan toleransi, serta membumikan ajaran agama yang sejalan dengan empat pilar kebangsaan. Pemahaman nilai keagamaan yang damai dan toleran harus disampaikan secara paripurna dan bertanggung jawab oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat karena pemahaman ajaran agama yang setengah-setengah adalah pintu bagi masuknya pemikiran radikal di tengah masyarakat. Karena itu, dengan pembentukan FKPT ini, diharapkan masyarakat makin menyadari bahwa tanggung jawab pencegahan terorisme bukan tugas institusi pemerintah, Polri, dan TNI semata, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (*civil society*).

Oleh sebab itu, koordinasi bersama aparat keamanan terkait pemantauan intensif terhadap segala bentuk perkembangan situasi khususnya aksi-aksi radikalisme maupun terorisme tetap terus digalakkan sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Maka sinergitas semua pemangku kepentingan dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang bahu-membahu dengan segenap unsur masyarakat adalah suatu keniscayaan dalam pencegahan terorisme.²¹

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap permasalahan memperkuat kebijakan negara dalam penanggulangan radikalisme di lembaga

21 Agus Surya Bakti, *Op.Cit.*

pendidikan ini, beberapa hal menarik yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam rangka membendung penyebaran paham radikal di lembaga pendidikan, pemerintah dapat melakukan sedikitnya tiga upaya sistematis yang diharapkan berdampak signifikan terhadap penangkalan radikalisme tersebut yaitu pertama penguatan ideologi toleransi di segala jenjang pendidikan dalam rangka menumbuhkan perilaku yang damai. Dalam hal ini peran tenaga pendidik dan muatan kurikulum menjadi sangat penting sebagai barometer pembangunan sikap dan mental peserta didik. Selanjutnya revitalisasi nilai dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipegang teguh bertujuan untuk memperkuat karakter warga negara dan menanamkan semangat nasionalisme dalam mendukung kehidupan nasional yang plural, toleran, dan damai. Upaya terakhir adalah memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*) melalui pemberdayaan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) sebagai perpanjangan tangan BNPT dan patner pemerintah yang bertujuan untuk menghimpun pelibatan masyarakat sipil secara massif dalam gerakan penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Kedua, Ideologi radikal mendapat momentum berkembang di tengah melemahnya semangat kebangsaan, munculnya pemahaman ajaran agama yang fanatik dan sempit, melemahnya implementasi pendidikan kewarga-negaraan, tingginya angka kemiskinan, serta tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas. Ini sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Oleh sebab itu penguatan paham Pancasila melalui pendidikan karakter menjadi tidak terelakkan sebagai perisai untuk mempersempit lingkup penyebaran ideologi radikal di tengah masyarakat. Pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter warga negara memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku warga negara.

Ketiga, dibutuhkan komitmen kuat, dukungan, dan kerja sama antara semua institusi pendidikan dan non pendidikan, swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan

terhadap ancaman penyebaran ideologi radikal. Termasuk diantaranya, penguatan peran keluarga sebagai sarana pendidikan informal yang memainkan peran sangat penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan remaja dan pemuda. Kontrol dan perhatian orang tua terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan para remaja dan anak-anak adalah mekanisme cegah dini yang sangat efektif membentengi menyebarnya ideologi radikal di lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Peran Serta Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme*, 1 Mei 2015. Diunduh dari <http://abdurrahman001.blogspot.co.id> tanggal 11 Januari 2016.
- Baedowi, Ahmad, *Paradoks Kebangsaan Siswa Kita*, dimuat dalam *Jurnal Ma'arif* Vol 8, No 1- Juli 2013.
- Haryatmoko, *Agama-Agama dan Masalah Kekerasan: Proses dari Imajiner Sosial ke Kekerasan*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia" Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.
- Hasani, Ismail, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara Dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Publikasi Setara Institute, 2009.
- Listianto, Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta, Ar Ruuz, 2004. Sebagaimana dikutip Daniel Maringan Tua, *Ibid*.
- Misrawi, Zuhairi, *Kontestasi Toleransi dan Intoleransi Bernuansa Agama*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional

- “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bermanusia Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.
- Rabasa, Angel, (et al.), *Deradicalizing Islamist Extremists*, National Security Research Division, Pittsburgh, 2010.
- Rubin, Barry, (Editor), *Guide to Islamist Movements (volume 1)*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2010.
- Rubin, Barry and Judith Colp Rubin, *Chronologies of Modern Terrorism*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2008.
- Sulistyo, Adi, *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, wordpress.com, 12 Februari 2014.
- Syam, Nur, *Mewaspada Ideologisasi Agama*, www.lkassurabaya.blogspot.com, 10 Agustus 2007, diakses tanggal 23 Februari 2015.
- Widnya, I Ketut, *Mencari Penyelesaian Konflik Keagamaan di Indonesia: Sebuah Refleksi Dari Pengalaman Sejarah Hindu*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bermanusia Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.